

**ANALISIS PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Irma Dwi Pusporini

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap
Email: irma2pusporini@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of employee expenditure, goods and service expenditure, and capital expenditure on economic growth in Central Java Province. The population in this study were 35 regencies and cities in Central Java Province. The technique of determining the sample using a purposive sampling is saturated or census. This type of data is secondary data in the years 2017 and 2018 from the Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan's Website of the Ministry of Finance Republic Indonesia and data from the Badan Pusat Statistik's Website. Technical analysis of data using multiple regression analysis. The results showed that employee expenditure and goods and services expenditure had a positive effect on economic growth, while capital expenditure did not have a positive effect on economic growth. Next studies, it should add other variables that affect economic growth.

Keywords: *employee expenditure; goods and service expenditure; capital expenditure; economic growth.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik penentuan sampel menggunakan *sampel jenuh atau sensus*. Jenis data adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 dan 2018 yang diperoleh dari Website Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan data dari Website Badan Pusat Statistik (BPS). Teknis analisis data menggunakan analisis regresi berganda Hasil penelitian menunjukkan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja modal; pertumbuhan ekonomi.

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tentang otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah/desentralisasi maka pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya dengan tetap berpedoman dengan aturan dari pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal harus tetap dilaksanakan secara rasional dan proporsional untuk menciptakan kondisi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang seimbang. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2002) otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan melakukan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno,2005).

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan keadaan perekonomian masyarakat dari suatu periode ke periode selanjutnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2019), pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama beberapa tahun ini dapat dikatakan cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 dan 2018 berturut-turut 5,26 %, dan 5,32 % sehingga dalam kurun waktu 2 tahun rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,29 %. “Salah satu peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah peran alokatif, yaitu pemerintah diwajibkan menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja daerah pada sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi (Deswantoro, 2017). Kebijakan pemerintah dalam peran alokatif tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan menyusun belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tepat dan proporsional.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, alokasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dinilai belum berkualitas, hal ini disebabkan karena jumlah prosentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah yang masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan prosentase belanja barang dan jasa terhadap belanja daerah, serta prosentase belanja modal untuk pembangunan terhadap total belanja

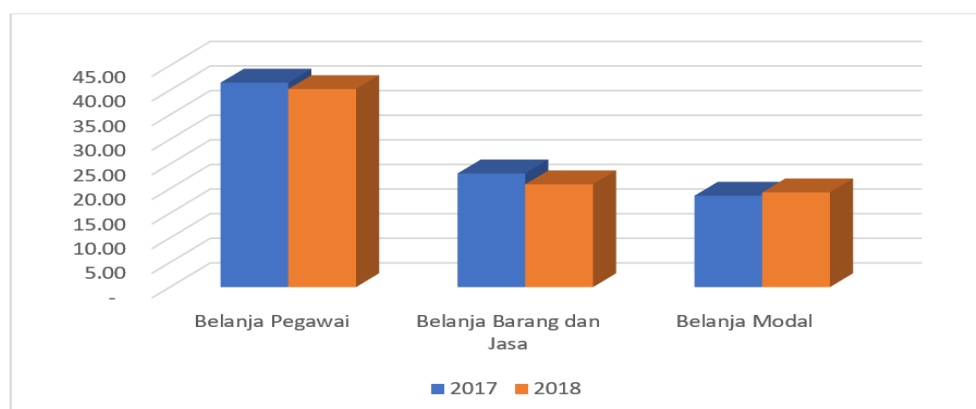
daerah. Proporsi belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Proporsi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dan 2018

Belanja Daerah	Tahun 2017	Prosentase	Tahun 2018	Prosentasi	Rata-rata
Belanja Pegawai	30,964,553,206,645.20	41.54	30,537,707,078,399.80	40.24	40.89
Belanja Barang dan Jasa	17,224,599,275,953.70	23.11	15,860,624,080,730.60	20.90	22.00
Belanja Modal	13,850,342,482,819.00	18.58	14,620,669,246,657.70	19.26	18.92
Total Belanja	74,532,946,903,384.70		75,893,735,354,459.00		

Sumber: DJPK, data diolah

Secara ringkas Proporsi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dan 2018 seperti tercantum pada Gambar 1.



Sumber:DJPK, data diolah

Gambar 1.
Prosentase Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1, proporsi belanja pegawai terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 dan

2018 rata-rata sebesar 40,89 %, proporsi belanja barang dan jasa terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 dan 2018 rata-rata sebesar 22,00 %, dan proporsi belanja modal terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 dan 2018 rata-rata sebesar 18,92 %. Besarnya belanja pegawai dibandingkan dengan belanja barang dan jasa dan belanja modal berkaitan dengan pemberian gaji pegawai termasuk gaji 13 dan tunjangan hari raya, serta tambahan penghasilan pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Studi empiris dari penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini terlihat dari penelitian (Deviani, 2016) yang menyebutkan bahwa belanja rutin dan belanja investasi tidak berpengaruh sedangkan belanja pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan (Jiranyakul, Komain and Brahmasrene, 2007) mengambil kesimpulan bahwa belanja pemerintah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak sebaliknya. Berdasarkan penelitian (Deswantoro, 2017) diperoleh kesimpulan bahwa belanja pegawai dan belanja modal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja barang dan jasa mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk menganalisis pengaruh APBD terutama belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal terhadap pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Menurut (Badrudin, 2012) penerimaan gaji dan honorarium di daerah yang bersangkutan oleh pegawai negeri akan menjadi faktor pendapatan yang akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai negeri tersebut. Kegiatan jual beli barang dan jasa yang terjadi di masyarakat terdiri dari permintaan dari konsumen yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya aktivitas ekonomi pada suatu daerah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas, penulis memprediksi bahwa belanja pegawai yang semakin besar pada suatu daerah, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, sehingga hipotesis kedua yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

H₁ : Belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu

daerah. Hasil penelitian (Hutabarat, 2013) menyebutkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Berdasarkan uraian di atas, penulis memprediksi bahwa apabila belanja barang dan jasa semakin meningkat, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat. Oleh karena itu, penulis mengajukan hipotesis kedua sebagai berikut :

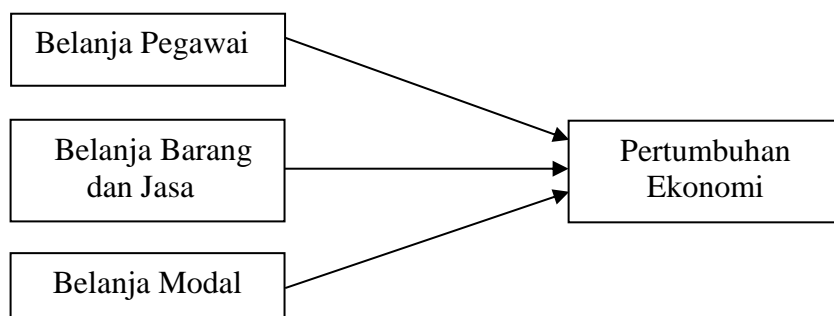
H₂: Belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Halim (2008), belanja modal merupakan bentuk investasi yang merupakan *capital expenditure* sebagai belanja/biaya pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Belanja modal dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di daerah berupa pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit serta fasilitas umum lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka aktifitas ekonomi daerah tersebut akan meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan daya saing dan investasi daerah tersebut. Hasil penelitian (Atmaja dan Mahalli, 2015) menyebutkan bahwa infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur berperan sebagai pendukung perkembangan ekonomi yang nantinya akan mendorong investasi dan memacu

aktivitas ekonomi. Dari hasil uraian di atas, penulis menduga bahwa belanja modal yang semakin meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penulis mengajukan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H₃: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, maka dapat disajikan model penelitian sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2.
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Cooper dan Schindler (2011), riset kuantitatif mencoba melakukan pengukuran yang akurat terhadap suatu penelitian. Penelitian dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data panel tahun 2017 dan 2018. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen yaitu dengan melihat dokumen baik dokumen tertulis maupun elektronik. Jenis data adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 dan

2018 yang diperoleh dari Website Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan data dari Website Badan Pusat Statistik (BPS). Data-data yang digunakan meliputi Data Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus. Menurut Sugiyono (2002) sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah seluruh populasi yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah sejumlah 35 Kabupaten/Kota dengan periode penelitian 2 tahun sehingga diperoleh 70 pengamatan.

Hipotesis diuji dengan melakukan analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression*) menggunakan program SPSS. Model penelitian ini merupakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Berutu (2009) dengan merubah variabel menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal karena pembagian belanja sudah berubah, tidak lagi menggunakan istilah belanja rutin dan belanja pembangunan, sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Ln PDRB}^{\text{HB}}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Ln Bpeg}^{\text{HB}}_{it} + \alpha_2 \text{Ln BJ}^{\text{HB}}_{it} + \alpha_3 \text{Ln Bmod}^{\text{HB}}_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

$\text{PDRB}^{\text{HB}}_{it}$ = Produk Domestik Nasional Bruto Harga Berlaku tahun t

$\text{Bpeg}^{\text{HB}}_{it}$ = Belanja Pegawai Harga Berlaku tahun t

- BJ^{HB}_{it} = Belanja Barang dan Jasa Harga Berlaku tahun t
 $Bmod^{HB}_{it}$ = Belanja Modal Harga Berlaku tahun t
 eit = *Error Term*
 α = Konstanta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran penilaian terhadap masing-masing variabel penelitian . Statistik deskriptif masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Deviasi Standar
BPeg (Belanja Pegawai)	26,48	28,06	27,4495	0,35194
BBJ (Belanja Barang dan Jasa)	26,19	28,13	26,8085	0,35217
BMod (Belanja Modal)	25,46	27,87	26,6458	0,41558
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	29,66	32,79	30,9601	0,62167

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa data variabel Belanja Pegawai antara 26,48 sampai 28,06 dengan rata-rata adalah sebesar 27,4495. Variabel Belanja Barang dan Jasa antara 26,19 sampai 28,13 dengan rata-rata adalah sebesar 26,8085. Skor jawaban responden untuk variabel belanja modal antara 25,46 dan 27,87 dengan nilai rata-rata adalah sebesar 26,6458. Untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto antara 29,66 sampai 32,79 dengan nilai rata-rata adalah sebesar 30,9601.

Standar deviasi untuk variabel Belanja Pegawai sebesar 0,35194 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan nilai Belanja Pegawai terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,35194. Standar deviasi untuk variabel Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto masing-masing adalah 0,35217; 0,41558; 0,62167.

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi di atas 5 % atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) semua variabel lebih besar dari 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas

Variabel Penelitian	Asymp. Sig (2-tailed)
Belanja Barang dan Jasa	0,553
Belanja Modal	0,403
PDRB	0,382

Sumber: data diolah, 2020

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau

variabel bebas. Pengaruh dari adanya multikolinieritas yaitu menyebabkan tingginya variabel pada sampel, sehingga standar *error* menjadi besar, dan akibatnya ketika koefisien diuji, *t* hitung akan bernilai lebih kecil dari *t* tabel. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Nilai *TOL (Tolerance)* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen pada hasil uji multikolinieritas dijadikan acuan untuk melihat apakah terjadi multikolinieritas pada model . Jika nilai *VIF* kurang dari 10, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Toleransi	VIF	Keterangan
Belanja Pegawai	0,484	2,065	Tidak terjadi multikolinieritas
Belanja Barang dan Jasa	0,592	1,689	Tidak terjadi multikolinieritas
Belanja Modal	0,412	2,427	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* variabel belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal melebihi 10% dan nilai *VIF* variabel belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada masing-masing variabel bebas yaitu variabel belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada sebuah model regresi ada perbedaan varian atau residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Adanya varian yang berbeda tersebut dinamakan heteroskedastisitas. Model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Dari hasil uji heterokedastisitas dapat diketahui nilai sig untuk variabel Belanja Pegawai adalah 0,076, variabel Belanja Barang dan Jasa adalah 0,754 dan variabel belanja modal 0,071. Karena nilai *sig* ketiga variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi.

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel variasi variabel dependen. Koefisien determinasi bernilai antara nol sampai dengan satu. Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya jika nilainya mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil uji koefisien Determinasi (R^2) seperti tertera pada Tabel 5.

Tabel 5.
Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,776 ^a	,601	,583	,40128

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji R^2 diperoleh nilai *R square* adalah sebesar 0,601. Koefisien R^2 sebesar 0,601 atau 60,1 persen yang dicapai menunjukkan bahwa 60,1

persen pertumbuhan perekonomian dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variable independen yaitu belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal sedangkan sisanya sebesar 39,9 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai R^2 pada model regresi termasuk dalam kategori tinggi karena nilai R^2 lebih dari 0,5.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS, maka hasil pengujian hipotesis terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-10,499	4,258		-2,466	,016
1 BPeg	,473	,197	,268	2,397	,019
BBJ	,858	,178	,486	4,815	,000
BM	,205	,181	,137	1,132	,262

Dependent Variable: PDRB

Sumber : data diolah

Berdasarkan hasil *t test* pada tabel 6 dapat diuraikan secara rinci pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

$$\text{Ln PDRB} = -10,499 + 0,473 \text{ LnBPeg} + 0,858 \text{ LnBBJ} + 0,205 \text{ LnBMod} + e \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

$\text{PDRB}^{\text{HB}}_{it}$ = Produk Domestik Nasional Bruto Harga Berlaku tahun t

$\text{Bpeg}^{\text{HB}}_{it}$ = Belanja Pegawai Harga Berlaku tahun t

BJ^{HB}_{it}	= Belanja Barang dan Jasa Harga Berlaku tahun t
$Bmod^{HB}_{it}$	= Belanja Modal Harga Berlaku tahun t
eit	= <i>Error Term</i>
α	= Konstanta

Persamaan tersebut menunjukkan variabel belanja pegawai dan belanja barang dan jasa memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1). Konstanta (α_0). Nilai konstanta yang diperoleh -10,499. Hal ini berarti jika variable independent (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal) tidak ada atau bernilai nol, maka besarnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar -10,449. 2). Koefisien Regresi ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$). Koefisien regresi untuk variabel belanja pegawai bernilai 0,473. Angka ini menunjukkan bahwa apabila belanja pegawai naik satu satuan maka akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,473. Nilai koefisien regresi untuk variable Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar 0,858. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan belanja Barang dan Jasa akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,858. Nilai koefisien regresi untuk variabel Belanja Modal adalah sebesar 0,205. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan belanja Modal akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,205.

Menurut Ghozali (2012) uji beda *t-test* digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara

individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Apabila hasil analisis dengan uji t diperoleh nilai probabilitas signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis diterima yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis 1 (Belanja Pegawai berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah). Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi belanja pegawai bernilai 0,473 dengan t hitung sebesar $3,297 > t$ tabel sebesar 1,668, sedangkan nilai sig adalah sebesar 0,019. Dengan demikian pada taraf kepercayaan 95%, nilai sig t sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi belanja pegawai, maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Deswanto, dkk (2017) yang menyebutkan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah. Hal ini disebabkan karena proporsi belanja pegawai lebih besar dibanding belanja barang dan jasa dan belanja modal dalam total belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu fungsi belanja daerah digunakan untuk membiayai gaji dan honorarium pegawai negeri di daerah. Belanja pegawai merupakan penghasilan pegawai negeri yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kegiatan konsumsi yaitu kegiatan pembelian barang dan jasa yang diperlukan oleh pegawai tersebut. Akibat dari penambahan gaji dan honorarium pegawai maka kejadian ekonomi yang berlaku di pasar yaitu adanya permintaan barang dan jasa yang bertambah. Selanjutnya hal ini ditindaklanjuti oleh produsen serta penyedia barang dan jasa untuk menghasilkan dan menyediakan barang dan jasa mengikuti kebutuhan masyarakat. Barang dan jasa kebutuhan pegawai yang mampu disediakan oleh produsen membuat para konsumen melakukan transaksi jual beli di daerahnya sendiri tanpa harus membeli di daerah lain sehingga hal tersebut akan meningkatkan aktivitas perekonomian yang ditandai dengan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

Hipotesis 2 (Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah). Berdasarkan hasil penelitian seperti yang tercantum dalam Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi belanja barang dan jasa adalah 0,205 dan nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $4,815 > 1,668$, dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian pada taraf kepercayaan 95%, nilai sig t sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa belanja barang dan jasa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah diterima. Artinya semakin tinggi belanja barang dan jasa, maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa belanja barang dan jasa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Belanja barang dan jasa yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah belanja barang dan jasa yang direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka pemenuhan dan pelayanan kebutuhan masyarakat, belanja barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah akan membuat para produsen dan penyedia jasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa tersebut. Hal ini berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hutabarat (2013), membuktikan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/kota di Sumatera Utara dan penelitian Badrudin (2012) yang menyebutkan bahwa belanja barang dan jasa pemerintah akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut.

Hipotesis 3 (Belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi belanja modal adalah 0,205 dan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $1,132 < 1,668$, dengan signifikansi 0,262. Dengan demikian pada taraf kepercayaan 95%, nilai $\text{sig } t$ sebesar 0,262 lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan nilai $\text{sig } t$ untuk variabel belanja modal adalah sebesar 0,262 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menandakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kelly, 1997) yang menyatakan bahwa pengeluaran investasi mempunyai efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian (Landau, 2013) menyebutkan bahwa belanja pemerintah yang besar terutama pengeluaran konsumsi akan menyebabkan pertumbuhan pendapatan per kapita menurun. Penelitian (Devarajan et al., 1996) menyimpulkan bahwa pengeluaran produktif mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini yang menemukan hasil yang tidak signifikan menandakan bahwa belanja modal di kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, paling tidak dalam jangka pendek. Hal ini sesuai dengan (UNDP, 2008) bahwa belanja modal membutuhkan waktu analisis yang lebih panjang dari lima tahun dan dampak tersebut sangat dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan dana.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang berarti bahwa belanja pegawai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang berarti bahwa belanja barang dan jasa mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dan Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang mengindikasikan bahwa belanja modal belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini mempunyai kelemahan karena hanya menggunakan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai sampel sehingga hasilnya kurang bisa digeneralisasi. Selain itu rentang waktu penelitian hanya 2 tahun yaitu tahun 2017 dan 2018. Saran dalam penelitian ini antara lain untuk pengeluaran pemerintah dari sisi jenis belanja terutama belanja pegawai dan belanja barang jasa harus bisa di efisiensikan untuk belanja yang langsung menyentuh pertumbuhan

ekonomi. Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja modal harus lebih difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memberikan waktu yang lebih lama dan menambah sampel data agar menghasilkan data yang lebih valid. Selain itu disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

REFERENSI

- Apriansyah, H. dan Fachrizal Bachri. (2006). Analisis Hubungan Kausalitas antara Investasi Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 4 Nomor 2. Hal 73–92.
- Atmaja, Harry Kurniadi dan Kasyful Mahalli. (2015). Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sibolga. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*. Volume 3 Nomor 4.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka. Semarang : CV Surya Lestari.
- Badrudin, R. (2012). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN
- Cooper, D.R. and P.S. Schindler. (2011). *Metode Riset Bisnis*, Terjemahan Budijanto, dkk. 2006. Jakarta : PT Media Global Edukasi.

- Deswanto, dkk. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(3), 187. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256>
- Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. F. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 37(2), 313–344. [https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(96\)90039-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(96)90039-2)
- Deviani. (2016). Analisis Belanja Daaerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1–13.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). *Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2011 (Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi)*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.(2017). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.(2018). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi III, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 23. Edisi 8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 117–124. [https://doi.org/10.1016/0014-4894\(54\)90048-X](https://doi.org/10.1016/0014-4894(54)90048-X)
- Halim, A. (2008). *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Hutabarat, P. (2013). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Tesis*, 1–12.

- Iswahyudin. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *E Jurnal Katalogis*, 4(6), 152–168.
- Jiranyakul, Komain and Tantatape Brahmasrene. (2007). The Relationship Between Government Expenditures and Economic Growth in Thailand. *Journal of Economics and Economic Education Research*. Volume 8 (2) <https://doi.org/10.29013/ejhss-18-5-52-56>.
- Kelly, T. (1997). Public investment and growth: Testing the non-linearity hypothesis. *International Review of Applied Economics*, 11(2), 249–262. <https://doi.org/10.1080/02692179700000016>.
- Landau, D. (2013). Government Expenditure and Economic Growth : Government Expenditure A Cross-Country Study. *Southern Economic Journal*, Vol. 49, No. 3 <http://www.jstor.org/stable/1058716>.
- Mangkoesebroto, G. (2010). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rahardjo, Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Rondonuwu, dkk. (2018). Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Modal dan Belanja Pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 13 (3), 436–444.
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha*, 2 (1), 65. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.237>.
- Soepangat, E., & Gaol, H.L. (1991). *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Irma Dwi Pusporini. Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap.....

Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (Edisi Ketiga). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Bappenas dan *United Nations Development Programme*. (2008). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. Jakarta : BRIDGE